

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Intoleransi merupakan tantangan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, agama, dan etnis. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas sosial, tetapi juga mengancam keutuhan bangsa. Salah satu bentuk intoleransi yang perlu mendapatkan perhatian adalah ideologi radikal yang mencoba mengubah karakter pluralistik masyarakat.

Perkembangan Islam di Indonesia sejalan dengan perubahan pemikirannya. Pemikiran Islam merupakan hasil ijtihad individu atau kelompok dalam memahami ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada masa Rasulullah, proses ijtihad dilakukan dengan bimbingan wahyu, sehingga apabila terjadi kesalahan, Allah SWT langsung memberikan koreksi melalui wahyu-Nya. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam mengembangkan dakwah serta membina umat Islam (Thoyyib, 2018) .

Salah satu fenomena yang muncul dalam sejarah Islam adalah radikalisme, yang dapat diartikan sebagai paham atau gerakan yang menginginkan perubahan secara ekstrem dengan menggunakan cara-cara keras. Umumnya, kelompok radikal menolak untuk tunduk pada pemerintahan yang sah. Sejarah mencatat bahwa radikalisme dalam Islam sudah terjadi sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu peristiwa besar yang menunjukkan adanya radikalisme adalah konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang berujung pada arbitrase. Dari peristiwa ini, muncul kelompok Khawarij yang dipimpin oleh Dhu al-Khuwaysirah. Mereka menganggap bahwa baik Ali maupun Muawiyah telah melakukan kesalahan besar, sehingga mereka merasa berhak untuk menghalalkan darah keduanya (Anshori, 2009).

Di Indonesia, fenomena radikalisme semakin nyata. jumlah kelompok radikal sebenarnya relatif kecil, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang menggunakan kekerasan dalam perjuangannya. gerakan radikalisme di Indonesia mulai muncul kembali pada era 1950-an dengan kemunculan gerakan Darul Islam (DI). Meskipun DI/TII Kartosoewiryo berhasil dipadamkan oleh pemerintah pada tahun 1962, ideologi gerakan ini telah mendapatkan simpati dari sebagian umat Islam, sehingga beberapa aktivis yang tidak tertangkap menjadi cikal bakal berkembangnya kembali gerakan radikal di Indonesia (Zulfadli, 2017).

Kehadiran kembali DI/TII tidak dapat dipungkiri. Beberapa tokoh yang berhasil menghindari penangkapan mendirikan kembali Darul Islam dan membangun basis di Solo, di bawah kepemimpinan Abu Bakar Ba'asyir (Zakariah, 2022). Selain faktor internal, pertumbuhan gerakan radikalisme di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. penyebaran paham Wahabi di Indonesia tidak terlepas dari peran Muhammad Natsir melalui organisasi Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). Organisasi ini memberikan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Ibn Saud. Melalui kerja sama ini, didirikan Lembaga Pengetahuan Bahasa Arab (LIPIA), yang menjadi salah satu pusat penyebaran paham Islam konservatif di Indonesia. Salah satu lulusan LIPIA yang cukup berpengaruh adalah Ja'far Umar Thalib, pendiri dan pemimpin Forum Komunikasi Ahlusunnah Wal-Jamaah (FKAWJ) (Sholehuddin, 2013).

Fenomena gerakan Darul Islam dan LIPIA menjadi faktor penting dalam perkembangan paham Islam radikal di Indonesia, baik dalam bentuk gerakan struktural maupun kultural. Namun, perkembangan gerakan Islam politik mengalami tekanan besar pada era Orde Baru. Pemerintahan yang semakin otoriter berusaha menekan kelompok-kelompok Islam yang dianggap radikal. Salah satu bentuk represi pemerintah adalah diterapkannya kebijakan atas tunggal Pancasila melalui Undang-Undang

No. 8 Tahun 1985. Kebijakan ini semakin memperkuat ketegangan antara pemerintah dengan kelompok Islam politik (Humaidi, 2010).

Meskipun demikian, kelompok-kelompok Islam ideologis tetap bertahan. Beberapa tokoh Islam yang menolak kebijakan pemerintah, seperti Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, tetap melanjutkan perjuangan mereka. Karena semakin mendapat tekanan, mereka akhirnya memilih untuk melarikan diri ke Malaysia pada tahun 1985. Pada periode ini, mulai muncul berbagai kelompok baru seperti DI/NII (Darul Islam/Negara Islam Indonesia), Ikhwanul Muslimin (IM), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan beberapa kelompok lainnya yang sering dikategorikan sebagai kelompok radikal. Pada awalnya, kelompok-kelompok ini beroperasi secara tertutup dan bergerak di bawah tanah. Namun, seiring waktu, mereka mulai menunjukkan eksistensinya secara terbuka melalui berbagai kegiatan rekrutmen dan propaganda ideologi, yang pada akhirnya membawa mereka ke panggung politik nasional (Mubarak, 2015).

Radikalisme di Indonesia menjadi isu yang sangat penting akan terus mendapatkan perhatian serius, baik dari kalangan akademisi, pemerintah, maupun masyarakat luas. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan nasional, namun juga mengancam integritas sosial dan nasional. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Riset BNPT 2020), pada tahun 2020 mencatat persentase perempuan yang terpapar paham radikalisme mencapai 12,3 persen sedangkan laki-laki 12,1 persen dari total penduduk muslim Indonesia memiliki kecenderungan radikalisme, dengan angka yang lebih tinggi di daerah tertentu. Selain itu, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan bahwa intoleransi masyarakat masih cukup tinggi pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, berdasarkan survei yang dilakukan pada September 2019 terhadap 1.550 responden (Novelino, 2019).

Penyebaran paham radikal dari kelompok Negara Islam Indonesia (NII) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, semakin mengkhawatirkan karena hampir seluruh kecamatan telah terpapar. Menurut pemikir kebinekaan,

Sukidi, kondisi ini dipicu oleh ketimpangan sosial, di mana masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan akses pembangunan yang terbatas menjadi lebih rentan terhadap pengaruh paham radikal. Ia menekankan bahwa langkah paling efektif dalam mengatasi radikalisme adalah dengan menyediakan lapangan kerja dan kehidupan yang layak, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka tanpa harus terjerumus dalam ideologi ekstrem.

Kemiskinan, keterbelakangan, serta kesenjangan sosial kerap menjadi faktor utama yang mendorong munculnya paham radikal dan aksi terorisme. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan amanah konstitusi dengan memastikan kesejahteraan bagi warga yang masih tertinggal. Selain pemerintah, organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga berperan penting dalam memperluas jangkauan dakwah untuk membimbing masyarakat yang belum sepenuhnya menerima ideologi Pancasila. Upaya ini dilakukan melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan guna mencegah penyebaran ideologi radikal dan menciptakan harmoni sosial di berbagai lapisan masyarakat

Ketua Pengurus Cabang NU Kabupaten Garut, Kyai Aceng Abdul Wahid, mengungkapkan bahwa paham radikal di wilayah tersebut menyebar baik secara terang-terangan maupun secara terselubung, dengan indikasi bahwa 41 dari 42 kecamatan telah terpengaruh oleh NII. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga menunjukkan bahwa jumlah anggota NII di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 170 ribu orang yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk DKI Jakarta, Garut, dan Lampung, di luar jumlah simpatisan yang belum terdata. Berdasarkan fakta tersebut, upaya pencegahan dan pemberantasan radikalisme menjadi hal yang sangat mendesak guna menjaga stabilitas nasional serta membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan (Nurwakhid, 2022).

Selama ini, penanganan radikalisme di Indonesia lebih banyak difokuskan oleh aktor negara, seperti BNPT, Densus 88, dan lembaga pemerintah lainnya. Pendekatan ini cenderung bersifat represif dan berorientasi pada penegakan hukum terhadap individu atau kelompok yang teridentifikasi terlibat dalam aktivitas terorisme atau radikalisme. Namun, pendekatan yang dominan dari negara ini seringkali tidak cukup efektif dalam mengatasi akar permasalahan radikalisme di tingkat masyarakat. kurangnya keterlibatan warga sipil dalam upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme menjadi salah satu celah yang perlu diperhatikan. Padahal, keterlibatan aktor non-negara, khususnya masyarakat sipil, memiliki potensi besar dalam upaya menangkal radikalisme. Oleh karna itu, penelitian ini tertarik untuk mengeksplorasi peran masyarakat sipil dalam penanggulangan radikalisme. Penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat sipil dalam menangkal radikalisme, mengapa mereka terlibat, dan apa dampak dari keterlibatan tersebut terhadap komunitas dan upaya pencegahan radikalisme secara lebih luas.

Untuk memberikan fokus yang lebih spesifik, penelitian ini akan mengkaji komunitas ALMAGARI di Kabupaten Garut, yang terkenal aktif dalam upaya penanggulangan paham radikal Negara Islam Indonesia (NII). Secara umum Peneliti tertarik mengkaji Kasus ALMAGARI ini, karena menunjukkan bagaimana inisiatif masyarakat lokal dapat berperan signifikan dalam menghadapi ancaman radikalisme di lingkungan mereka. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika peran masyarakat sipil dalam konteks pencegahan radikalisme di Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan menyoroti berbagai strategi yang diterapkan ALMAGARI dalam membangun ketahanan sosial, meningkatkan literasi keagamaan yang moderat, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil lainnya guna menciptakan pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam upaya deradikalisasi di tingkat lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah ini adalah sebagai berikut.

1. Strategi apa yang dilakukan ALMAGARI dalam menangkal penyebaran Ideologi Radikal Negara Islam Indonesia di Kabupaten Garut?
2. Tantangan apa yang dihadapi oleh ALMAGARI dalam menangkal penyebaran ideologi radikal Negara Islam Indonesia di Kabupaten Garut?
3. Mengapa ALMAGARI terlibat dalam menangkal radikalisme dari Ideologi Negara Islam Indonesia di Kabupaten Garut? dan
4. Bagaimana efek keterlibatan ALMAGARI dalam menangkal radikalisme terhadap penyebaran ideologi Negara Islam Indonesia di Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan ALMAGARI dalam menghadapi penyebaran ideologi radikal Negara Islam Indonesia di Kabupaten Garut;
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh ALMAGARI dalam menangkal penyebaran ideologi radikal Negara Islam Indonesia di Kabupaten Garut;
3. Untuk mengetahui ALMAGARI terlibat dalam menangkal Radikalisme dari Ideologi Negara Islam Indonesia di Kabupaten Garut? dan
4. Untuk mengetahui efek strategi ALMAGARI dalam Menangkal Ideologi Radikalisme terhadap Penyebaran Ideologi Negara Islam Indonesia di Kabupaten Garut.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti mengharapkan temuan pada penelitian ini akan memiliki manfaat akademik dan manfaat praktis di masa depan, antara lain sebagai berikut.

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu sosiologi terkhusus dalam konteks gerakan sosial. Dengan menggunakan teori Modal Sosial, peneliti ini memberikan pemahaman atau pengetahuan baru mengenai permasalahan dan strategi Organisasi ALMAGARI dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang bahaya-Nya radikalisme. Selain itu, peneliti ini bisa menjadikan referensi karya ilmiah bagi para akademisi atau mahasiswa yang tertarik dalam mengkaji gerakan sosial di ruang lingkup masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi kelompok ALMAGARI dan komunitas yang serupa dalam memperkuat strategi dan efektivitas komunitas mereka. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat terkait dengan bahaya-Nya radikalisme, serta mampu untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur lapisan masyarakat dalam menjaga ke-Utuhan bangsa dan negara.

E. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, pendekatan teoritis yang digunakan bertumpu pada dua landasan penting dalam ilmu sosial. Pertama, Teori Struktural Fungsional digunakan sebagai kerangka utama (*grand theory*) untuk memahami bagaimana masyarakat mempertahankan stabilitas dan keteraturan sosialnya dalam menghadapi tantangan eksternal, seperti penyebaran ideologi radikal. Kedua, sebagai kerangka menengah (*middle theory*), digunakan teori Modal Sosial yang menjelaskan bagaimana

hubungan sosial, kepercayaan, dan jaringan antarkelompok memainkan peran penting dalam menjaga kohesi sosial. Keduanya digunakan untuk menganalisis peran strategis organisasi masyarakat sipil sebagai aktor non-negara, khususnya ALMAGARI (Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleransi), dalam menghadapi ancaman ideologi radikal seperti Negara Islam Indonesia (NII) di Kabupaten Garut.

Teori Struktural Fungsional berangkat dari asumsi bahwa masyarakat merupakan sistem yang tersusun atas bagian-bagian atau institusi yang saling terkait dan berfungsi secara terpadu untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup sosial. Emile Durkheim adalah salah satu pelopor teori ini yang menekankan pentingnya solidaritas sosial dan pembentukan norma sebagai dasar keteraturan sosial. Menurutnya, keberlangsungan masyarakat ditentukan oleh kohesi sosial yang terbentuk melalui nilai dan aturan bersama.

Teori ini kemudian diperluas oleh Talcott Parsons, yang merumuskan model AGIL sebagai empat prasyarat utama dalam sistem sosial: *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency*. *Adaptation* merujuk pada kemampuan sistem dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal; *Goal Attainment* mengacu pada kapasitas sistem dalam menentukan dan mencapai tujuannya; *Integration* menyangkut keterkaitan antarbagian sistem agar bekerja secara harmonis; dan *Latency* berkaitan dengan pelestarian nilai dan pola budaya yang menopang sistem sosial.

Dalam konteks penelitian ini, model AGIL relevan untuk menjelaskan bagaimana ALMAGARI berperan dalam mengisi fungsi integratif dan normatif di tengah masyarakat. Organisasi ini dapat dilihat sebagai aktor yang menjalankan fungsi *Integration* dengan merajut kembali hubungan sosial yang mulai terfragmentasi oleh infiltrasi ideologi radikal,

dan fungsi Latency dengan menyebarluaskan nilai-nilai moderat, toleransi, serta nasionalisme religius kepada masyarakat.

Robert K. Merton memperkaya perspektif ini dengan menyatakan bahwa tidak semua struktur sosial berfungsi positif. Ia memperkenalkan konsep disfungsi, yakni keadaan di mana suatu institusi atau struktur justru melemahkan stabilitas sosial. Misalnya, ketika lembaga pendidikan atau keluarga gagal membentuk karakter kebangsaan, kekosongan fungsi tersebut bisa diisi oleh kelompok radikal. Di sinilah ALMAGARI berperan sebagai pelengkap atau pengganti fungsi lembaga formal yang tidak berjalan secara optimal.

Teori Modal Sosial Kekuatan dalam Relasi dan Kepercayaan, Teori modal sosial digunakan sebagai teori menengah karena berfokus pada interaksi sosial dan kepercayaan yang menjadi fondasi dalam mengorganisasi perlawanan terhadap radikalisme. Robert Putnam (1995) membagi modal sosial menjadi dua bentuk utama: *bonding social capital* dan *bridging social capital*. *Bonding* adalah ikatan antaranggota dalam kelompok homogen (misalnya, komunitas berbasis nilai keagamaan atau kedaerahan), sementara *bridging* mencakup hubungan lintas kelompok yang heterogen (misalnya, antara masyarakat sipil dan aparat pemerintah).

Dalam implementasinya, ALMAGARI mengoptimalkan kedua jenis modal sosial tersebut. Sebagai contoh, untuk modal sosial bonding, organisasi ini mengonsolidasikan hubungan dalam komunitas lokal yang memiliki kesamaan nilai, seperti sesama tokoh agama dan aktivis pendidikan. Sementara dalam konteks modal sosial bridging, ALMAGARI menjalin kolaborasi strategis dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, akademisi, dan elemen lintas agama guna menciptakan kerja sama yang luas dan inklusif dalam menangkal radikalisme.

Keberhasilan program berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh seberapa besar kepercayaan dan hubungan sosial yang dimiliki aktor-aktor lokal. Keberadaan modal sosial memungkinkan masyarakat untuk melakukan aksi kolektif tanpa dominasi kekuatan koersif. Hal ini menjadi keunggulan ALMAGARI, yang menggunakan pendekatan persuasif dan partisipatif, bukan represif.

Gabungan antara teori struktural fungsional dan teori modal sosial memungkinkan pemahaman yang menyeluruh atas fenomena sosial yang dikaji. Secara struktural fungsional, ALMAGARI dilihat sebagai unit sosial yang menjalankan fungsi sosial penting dalam menjaga keteraturan masyarakat, terutama dalam menghadapi ancaman yang mengganggu stabilitas sistem sosial. Sedangkan dari perspektif modal sosial, organisasi ini dilihat sebagai simpul yang menggerakkan kepercayaan, partisipasi, dan solidaritas sosial untuk menciptakan ketahanan kolektif.

Dalam hal perlawanan terhadap ideologi radikal, terutama terkait dengan NII, kedua bentuk modal sosial ini menjadi sangat penting. ALMAGARI sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil lokal memanfaatkan *bonding social capital* untuk memperkuat ikatan internal di kalangan masyarakat Garut, dengan menggunakan pendekatan berbasis nilai budaya dan keagamaan. Sementara itu, *bridging social capital* dimanfaatkan untuk membangun jaringan komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, tokoh agama, dan aparat keamanan untuk menangkal infiltrasi ideologi radikal.

Sebagai aktor non-negara, ALMAGARI memainkan peran penting dalam melawan ideologi radikal yang berpotensi mengancam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbagai aktivitas strategis dilakukan oleh ALMAGARI, mulai dari kampanye anti-radikalisme yang berbasis pada nilai-nilai lokal, pendidikan kewarganegaraan untuk kalangan muda, hingga pendampingan bagi mantan anggota atau simpatian NII agar

kembali ke jalan yang moderat. Keberhasilan organisasi ini tidak hanya bergantung pada kapasitas internalnya, tetapi juga pada kekuatan jaringan sosial yang telah dibangun dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mereka sebagai representasi dari suara lokal.

Seperti yang dikatakan Husni (2017), dalam perspektif modal sosial, kontribusi ALMAGARI dapat dianalisis melalui beberapa dimensi berikut:

1. **Jaringan Sosial (*Social Network*):** ALMAGARI membangun relasi dengan berbagai aktor sosial seperti tokoh agama, masyarakat adat, pemerintah daerah, serta aparat keamanan. Jaringan sosial ini memperkuat koordinasi dan memberikan informasi lebih cepat mengenai gerakan-gerakan radikal. Selain itu, jaringan ini juga membantu menciptakan sistem pengawasan sosial yang informal, yang dapat mendeteksi individu yang berpotensi terpapar ideologi radikal.
2. **Kepercayaan (*Trust*):** Kepercayaan masyarakat terhadap ALMAGARI menjadi faktor krusial untuk keberhasilan program-program deradikalisasi dan pencegahan radikalisme. Kepercayaan ini tumbuh karena pendekatan yang digunakan ALMAGARI lebih bersifat inklusif dan berbasis pada budaya lokal, serta mengedepankan dialog dan edukasi, daripada pendekatan represif.
3. **Norma Sosial (*Social Norms*):** ALMAGARI berusaha membentuk norma sosial yang mengutamakan nilai-nilai moderat dan menolak kekerasan. Narasi bersama yang dikembangkan oleh ALMAGARI menekankan bahwa radikalisme tidak hanya bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga merusak struktur sosial dan budaya masyarakat Garut. Dengan cara ini, ALMAGARI membantu memperkuat ketahanan sosial masyarakat terhadap pengaruh radikalasi.
4. **Partisipasi Sosial (*Civic Engagement*):** ALMAGARI aktif mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang membangun semangat kebangsaan dan kebinekaan, seperti diskusi publik, pelatihan kewarganegaraan, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Keberadaan teori modal sosial dalam konteks ini sangat relevan, karena teori ini menekankan bahwa hubungan sosial antar individu dan kekuatan kolektif masyarakat menjadi alat yang sangat efektif dalam menangkal ancaman ideologi radikal, seperti yang diajarkan oleh kelompok NII. Radikalisasi tidak muncul begitu saja di ruang yang kosong, ia berkembang di dalam struktur sosial yang lemah, terputusnya hubungan antar individu, serta hilangnya rasa saling percaya di antara masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil oleh ALMAGARI bertujuan untuk mengembalikan integrasi sosial, memperkuat ketahanan kolektif, serta membendung narasi-narasi ekstrem yang merusak.

Teori modal sosial juga menegaskan bahwa pencegahan radikalisasi bukanlah semata-mata tugas negara melalui aparat keamanan, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat sipil. Negara sering kali kesulitan memasuki ruang-ruang sosial yang sangat dipengaruhi oleh hubungan pribadi dan norma-norma lokal. Dalam hal ini, ALMAGARI hadir sebagai penghubung yang mempertemukan masyarakat dengan negara, menjembatani komunikasi antara keduanya, dan membentuk kesadaran kolektif di tingkat akar rumput melalui kekuatan sosialnya. Dengan demikian, teori modal sosial sangat penting untuk menjelaskan peran dan kontribusi organisasi non-negara dalam menciptakan pertahanan ideologis masyarakat, dengan menggunakan pendekatan yang berbasis pada relasi sosial, budaya, serta lokalitas. Skema kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1.1 Skema Konseptual

Teori Struktural Fungsional
(Grand Theori)

Teori struktural fungsional adalah salah satu teori besar (grand theory) dalam ilmu sosiologi yang digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat bekerja sebagai suatu sistem yang saling terhubung.

